



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin** Tanggal : **15** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
 2, 4, **6**, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

DUKCAPIL

Warga Rusun Urus SKDS

JAKARTA (Suara Karya):Sebanyak 95 warga Rumah Rusun (Rusun) Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ramai-ramai bikin Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) yang di gelar Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil), Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Pembuatan dokumen kependudukan yang dilakukan dengan cara jemput bola yang digelar Dukcapil Jakpus dimanfaatkan warga penghuni rumah susun (Rusun) Karang Anyar membuat akte lahir dan akte perkawinan. Pada pelayanan tersebut 6 warga Rusun dibuatkan akte lahir dan 2 akte perkawinan.

"Alhamdulillah, saya sekarang sudah punya surat keterangan domisili sementara (SKDS), kalau begini aman rasanya," ujar Hastuti (27), warga Depok yang baru kos 2 bulan diblangan Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus).

"Jadi saya nggak usah repot lagi datang ke kelurahan Karang Anyar untuk membuat SKDS. Untung ada layanan jemput bola untuk mengurus dokumen kependudukan, jadi nggak usah repot-repot datang ke kantor kelurahan," ujarnya.

Asisten Pemerintahan Jakpus Budi S saat memimpin pelaksanaan Biduk di Rusun Karang Anyar mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dukcapil, dan langkah ini harus terus dilaksanakan, karena sangat membantu warga yang sempat datang ke kelurahan.

Untuk itu kepada warga yang masih memiliki KTP daerah tetapi ingin tinggal di Jakarta supaya membuat SKDS. "Tujuannya untuk tertib administrasi kependudukan," katanya menambahkan.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Dukcapil Jakarta Pusat Hj Warisih mengatakan Kegiatan Pembinaan Penduduk (Biduk) dilakukan sebagai upaya pendataan terhadap warga daerah yang tinggal di Jakarta. Selain itu, SKDS bisa dijadikan pengaman atau bukti ketika ada razia kependudukan. SKDS itu sendiri berlaku selama satu tahun.

Adapun syarat untuk membuat SKDS anatar lain, memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) daerah asal, ada rumah tinggal di Jakarta yang dibuktikan dengan KTP dan KK Penjamin, serta surat pengantar RT/RW.

"Dari hasil biduk yang digelar di Rusun Karang Anyar, kami melakukan pelayanan pengurusan SKDS 95 warga, 6 warga membuat akte lahir dan 2 warga membuat akte perkawinan," ucap Warisih menambahkan. (yon)

Intruksi / Informasi

Isikan / Kepada



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin**

Tanggal : **15**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA : ① Indo Pos
2. Jawa Pos
3. Kompas
4. Koran Sindo
5. Koran Tempo
6. Lampu Hijau
7. Media Indonesia
8. NonStop
9. Pos Kota
10. Pelita
11. Rakyat Merdeka
12. Republika
13. Suara Karya
14. Sentana
15. Warta Kota
16. Harian Terbit
17. Sinar Harapan
18.

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, ⑩, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



DANI TH/WWW.GODODOPOK

PEMBINAAN PENDUDUK: Warga dipermudah dengan program pembuatan dokumen.

Puluhan Warga Rusun Urus Surat Domisili

SEDIKITNYA 95 warga Rumah Rusun (Rusun) Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ramal-ramal mengurus Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS). Itu lantaran Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Pusat, membuka layanan jemput bola ke lokasi tersebut.

Warga yang lain juga memanfaatkannya untuk membuat dokumen kependudukan lainnya. Seperti mengurus akte lahir juga akte perkawinan. Pada pelayanan itu, enam warga rusun dibuatkan akte lahir dan dua akte perkawinan. "Alhamdulillah, saya sekarang sudah punya Surat Keterangan Domisili Sementara, kalau begini aman rasanya," ujar Tut, 27, Warga Depok yang baru kos dua bulan di bilangan Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Sehingga dirinya tidak perlu repot lagi datang ke Kantor Kelurahan Karang Anyar untuk membuat SKDS. Asisten Pemerintahan Jakarta Pusat, Budi S saat memimpin pelaksanaan Pembinaan Penduduk (Biduk) di Rusun Karang Anyar mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Dukcapil. Langkah tersebut harus terus dilaksanakan lantaran sangat membantu warga.

"Untuk itu kepada warga yang masih memiliki KTP daerah tetapi ingin tinggal di Jakarta supaya membuat Surat Keterangan Domisili Sementara, ini tujuan untuk tertib administrasi kependudukan," jelasnya.

Sedangkan Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat, Warisih mengatakan kegiatan Biduk dilakukan sebagai upaya pendataan terhadap warga daerah yang tinggal di Jakarta. Selain itu, SKDS bisa dijadikan pengaman atau bukti ketika ada razia kependudukan. SKDS itu sendiri berlaku selama satu tahun. (dni)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : *Senin* Tanggal : *15* Bulan : *JUNI* Tahun : *2015*

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Penertiban PKL Tanah Abang Walikota Jakpus Hindari Tanggungjawab

Jakarta SENTANA

SEJUMLAH kalangan masyarakat Jakarta Pusat menilai, Walikota Mangara Pardede terkesan kurang bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan kota dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, dan PKL lainnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama alias Ahok sebelumnya telah memerintahkan Walikota Jakarta Pusat beserta jajarannya untuk menertibkan para PKL yang bejulan di badan jalan kawasan pasar Tanah Abang.

Kawasan perdagangan Tanah Abang harus steril dari PKL yang menggunakan fasilitas umum, namun pelaksanaan penertiban tersebut seolah olah di hindari Walikota dengan

menyerahkan ke Wakilnya. Sejumlah pengakuan sumber di lingkungan kantor walikota Jakarta Pusat yang dihimpun Harian Sentana 12/6, disebutkan, "untuk penertiban PKL kawasan Tanah Abang Walikota menyerahkan tanggung jawabnya ke Wakil Walikota.

Hal tersebut dimungkinkan untuk menghindari bentrok atau perselisihan dengan penguasa kawasan Tanah Abang yang sudah lama dijalin somasa Sekre-

taris Dewan.

Untuk diketahui, sebelum menjabat walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede tadinya menjabat Sekretaris DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD Jalan Kebonsirih Jakarta Pusat. Ahok mengangkat Mangara menjadi Walikota Jakarta Pusat dengan harapan mampu kerja untuk rakyat Jakarta, untuk memperbaiki, menata kota steril dari PKL yang merusak taman, diatas trotoar, bahu jalan, sementara perintah Gubernur tersebut seolah olah terabaikan belum maksimal dilaksanakan.

Walikota beserta jajaran SKPD Jakarta Pusat, boleh dikatakan selama satu tahun ini hanya melaksanakan acara acara seremonial atau publikasi pencitraan dengan memberikan sumbangan atau bantuan sosial, pada hal PKL masih meraja lela menguasai ke-

pentingan umum, seperti kawasan Tanah Abang, PKL jalan AM. Sangaji di kelurahan Petojo Utara, PKL jalan Gempol Kebon Kosong Kemayoran, Jalan Kalibaru Bungar, Senen, PKL di kawasan Pasar Baru juga belum ditertibkan.

Menyikapi hal tersebut, Mangara bantah menghindari tanggung jawab menyerahkan ke Wakil untuk menertibkan PKL wilayah Jakarta Pusat.

Menurut Mangara pada Harian Sentana 12/6, "terkait hubungannya ke anggota Dewan penguasa Tanah Abang saat menjabat Sekwan dan akan retak jika PKL Tanah Abang ditertibkan, itu tidak ada hubungannya dengan penertiban, saya tidak mengerti hal itu, jadi jangan dikaitkainkan semasa saya jadi Sekwan seluruh PKL akan ditertibkan" katanya. ■TS





GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin**

Tanggal : **15**

Bulan : **JUNI**

Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, **11A**, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Wakili DKI Jakarta Lomba Sekolah Sehat **SMKN 27 Bisa Jadi Juara Nasional**

TIM Penilai Lomba Sekolah Sehat (LKS) tingkat Nasional 2015, kemarin mengunjungi SMK Negeri 27, Jakarta Pusat, yang mewakili Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Walikota Jakarta Pusat, Arifin, yang menyambut tim penilai mengharapkan dapat memberikan penilaian maksimal hingga bisa menjadi Juara I. "Saya tidak akan mempengaruhi Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat, namun berharap SMKN 27 mampu menjadi juara mewakili DKI Jakarta," katanya, di hadapan tim penilai, para guru, dan peserta didik.

Menurut Arifin, sekolah yang berada di wilayah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar tersebut, memiliki segudang prestasi baik tingkat nasional maupun in-

ternasional. "Saya yakin semua prestasi yang didapat ini bukan sebatas pada saat ada perlombaan."

BISA JUARA

Ketua Tim penilai LKS, Dwi Rahmawati, mengaku terkesima saat memasuki lingkungan SMKN 27 lantaran keasriannya. "Saya tidak menyangka ada sekolah seasri, sesejuk, dan semudah ini. Seakan-akan berada di Bogor saja."

Melihat secara kasat mata, sekolah SMKN 27 dapat menjadi juara, akan tetapi semua itu akan dilihat lebih dulu secara langsung baik secara administrasi dan hal lainnya. "Kami juga harus menyesuaikan sejumlah data yang diterima, apakah sesuai atau tidak," jelasnya. (deny)



Wakil Walikota Jakpus, Arifin, saat menyambut tim penilai LSS di SMKN 27.



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin** Tanggal : **15** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Pentil 1.300 Kendaraan Dicabut

GAMBIR (Pos Kota) – Dalam sepekan Operasi Cabut Pentil (OCP) digelar Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, 1.300 kendaraan roda dua dan empat terjaring.

"Hampir setiap hari kami menggelar operasi cabut pentil," terang Kepala Suku Dinas (Sudin) Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Henry Perez Sitorus, Minggu (15/6).

Menurut Henry, beberapa lokasi menjadi sasaran seperti kawasan Pasar Tanah Abang, Gambir, Menteng, kolong fly over Roxy, dan Thamrin. "Lokasi tersebut menjadi fokus operasi lantaran banyak laporan pengguna jalan terganggu akibat kendaraan parkir sembarang," jelas mantan Camat Sawah Besar itu.



Petugas Sudin Perhubungan dan Transportasi mencabut pentil motor di Tanah Abang.

BIKIN JERA

Pihaknya juga menjaring sejumlah motor dan dibawa ke Polantas agar dikenai sanksi tilang. "Sanksi ini agar pengendara jera, tidak

parkir disembarang tempat meski ada yang mengarahkan," paparnya.

Dengan gencarnya razia, diharapkan mampu mengurangi parkir liar di ka-

wasan Jakpus. "Solusi lainnya, kami telah berkoordinasi dengan pihak swasta untuk ikut menyediakan kantong parkir di beberapa tempat," jelasnya. (deny/ak)



GUNTINGAN BERITA
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin** Tanggal : **15** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Lenggang Jakarta Sepi Pedagang Bisa Angkat Kaki

GAMBIR (Pos Kota) - Ratusan pedagang binaan Lenggang Jakarta di IRTI Monas, Jakarta Pusat, mengeluh karena sepi pembeli dan menilai potongan 30 persen oleh pengelola terlalu tinggi.

Pericut foto

Menurut pedagang, harga yang ditentukan PT Reko terlalu mahal. Diperparah lagi, ratusan pedagang Kaki 5 musib telah berjualan di sekitar Terasa Monas. "Meskipun 15 persen saja," kata Hasan, salah satu pedagang kuliner.

Sebetaris Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (KUMKM) DKI Jakarta, Irwandi, mengatakan pihaknya berupaya mengundang PT Reko selaku pengelola dan UPT Monas untuk memecahkan solusi agar pusat perdagangan di Jalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Arah) bisa lebih berpijak.

"Kami sedang berupaya memecahkan masalah dengan mengundang sejumlah pihak terkait karena keluhan pedagang tidak digubris. Solusi diumumkan, mereka bisa angkat kaki. Lain waktu dan lokasi berjualan di lokasi berjualan," ujarnya di Jekan

“
Kaki Lima Liar
Marak, Potongan
30 Persen Terlalu
Mahal
”

sa, Minggu (14/6)

5 TAHUN

Irwandi mengaku sudah menampung sekitar keluhan pedagang. "Kami akan mengajak PT Reko, UPT Monas, dan SKPD lainnya untuk membahas berbagai keluhan pedagang," ujarnya.

Lenggang Jakarta menampung 381 pedagang binaan yang datang dari kawasan Terasa Monas.

Facilitas pusat perdagangan dan kuliner Lenggang Jakarta dibangun PT Reko Perusahaan ini mendapat izin dari Pemprov DKI mengelola kawasan itu sam-



Pusat perdagangan souvenir dan kuliner di Lenggang Jakarta, Monas.

pad lima tahun ke depan. Reko juga berkewajiban membina pedagang untuk berjualan secara rapih, terutama pedagang kuliner harus bisa menyajikan menu lezat dan higienis. Sebagai imbalan, mendapat jatah 30 persen dari omset penjualan.

TUTUP PINTU

Irwandi akan menyalurkan hal tersebut pada forum rapat. "Memang

presentasinya perlu diturunkan lagi agar pedagang bisa menjual produk lebih murah."

Dia menambahkan saat ini harga kelopak sekitar Rp20 ribu per biji, nasi ayam goreng Rp35 ribu, lontong sayur Rp25 ribu, sehingga labrak pembuat lontaran mahal. "Setelah itu, UPT Monas harus mampu memberikan pedagang lain, agar tidak mengganggu aktivitas Lenggang Jakarta yang

merupakan salah satu proyek unggulan Bapak Ahok," tandasnya.

Phaktanya juga akan sinta kepada UPT Monas untuk meninjau pasar sore selain Monas dan membuka pasar di utara. Sehingga sebagian besar labrak yang pengasutan Monas relesasi, perlu pindah Lenggang Jakarta yang tentunya akan membuat aktivitas berjual lebih ramai. (D)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin** Tanggal : **15** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos 2. Jawa Pos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. Lampu Hijau 7. Media Indonesia 8. NonStop 9. Pos Kota 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya Sentana 15. Warta Kota	16. Harian Terbit 17. Sinar Harapan 18.
Halaman :	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,			Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Poin Pentingnya Calon Kepala Dinas Harus Jujur dan Pekerja Keras

Calon Kepala Dinas Uji Nyali Di Depan Gubernur & Wagub

” Ya (akan ada pergantian), tetapi mau wawancara dulu. Saya sudah diskusi sama Pak Gubernur untuk wawancara mereka. Akan diatur nanti apakah bersamaan atau bergantian. Sebelum puasa nanti dilakukan



Pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV beberapa waktu lalu di Lapangan Monas.

PEROMBAKAN pejabat eselon II dilindungi Pemprov DKI tinggal menghitung hari. Rencananya Senin (15/6) hari ini sejumlah calon kepala dinas bakal uji nyali di depan Gubernur Ahok dan Wagub Djarot Saiful Hidayat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat resmi berinteraksi bahwa pada pekan ini akan ada pergantian terhadap sejumlah kepala dinas yang mengopir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Naman ia belum mau menyebut kepala dinas mana saja yang akan diganti. Yang pasti, kata Djarot, ia dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala dinas yang baru.

Calon kepala dinas diambil dari pros pejabat eselon III yang baru saja naik tingkat ke eselon II.

”Ya (akan ada pergantian), tetapi mau wawancara dulu. Saya sudah diskusi sama Pak Gubernur untuk wawancara mereka. Akan diatur nanti apakah bersamaan atau bergantian. Sebelum puasa nanti dilakukan,” ujar Djarot kemarin.

Djarot mengatakan tidak ada kriteria khusus terhadap pejabat yang nantinya akan menempati posisi sebagai kepala SKPD. Yang penting, aja dia, pejabat tersebut adalah orang yang jujur dan mau bekerja keras.

”Poin pentingnya jujur dan kerja keras. Selama ini masih

banyak yg belum seperti itu.” ujar dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memosisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memaklami adanya dalam memimpin ibu kota. Termasuk gagasannya soal reformasi birokrasi dalam pengelolahan pemerintahan.

Ide-ide tersebut ia harap bisa diaplikasikan di lapangan dengan cara memantainya di media. Terlebih saat ini, berita sudah diakses melalui internet sehingga PNS cukup mudah memahami idenya tersebut. ”Saya sudah sering ngomong begitu banyak, kalau mereka PNS yang benar, komunikasi tentu bisa saya ang-

gak? Pasti iktu,” kata Ahok kemarin.

Menurut Ahok, dengan mem-beskan ide-ide yang dituliskan di media maka PNS bisa dengan mudah memencernya. ”Jadi mungkin mereka sudah mengerti, artinya saya mau ke mana dan kalau dia mengerti, ketika ada orang ajak dia ngomong, dia sudah bisa jawab maknanya. Bapak begini-begini lah,” ucapnya.

Dia pun memura agar pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk bekerja dengan cepat. Jika tidak, maka akan langsung diganti dengan pejabat lainnya. Sebab, evaluasi kinerja pejabat akan dilakukan setiap en-

am bulan sekali.

Ia terhadap pergantian sejumlah pejabat kepala SKPD mulai mengait di lingkungan Balai Kota. Hal itu menyusul ditugaskannya 30 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan yang sebelumnya berada di eselon III menjadi eselon II.

Selanjutnya ada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sasaran, yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Dinas Kebencanaan, Dinas Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Pertahanan dan Pemukiman, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. (BCR/AZ/HW)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin** Tanggal : **15** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Hindari Tawuran dan Narkoba, BNN Bina Warga Menteng Melalui Kesenian

Jakarta, SENTANA

SEJUMLAH lokasi di Jakarta seperti Menteng Tenggulun dan Johar Baru, Jakarta Pusat serta Pasar Rumput, Jakarta Selatan terkenal akrab dengan aksi tawuran. Selain menjadi daerah rawan tawuran, lokasi-lokasi itu juga disinyalir sebagai lokasi yang rawan akan peredaran narkoba.

"Peredaran narkoba di daerah Menteng saat ini memang sudah sangat menguatirkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi salah satu prioritas terutama di wilayah Menteng Tenggulun. Selain itu tawuran yang kerap melibatkan kelompok warga Menteng tenggulun, adanya ujar Lurah Menteng Agus Sulaeman pad acara Pemberdayaan Alternatif Melalui Pembinaan Kesenian Bagi Pemuda Di Menteng Tenggulun dan Sekitarnya yang di gelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Agus berdasarkan catatan di Kelurahan Menteng kurun waktu 2005 -2008 terdapat 50 orang warga Menteng Tenggulun yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba #TBNSTN



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *15*

Bulan : *JUNI*

Tahun : *2015*

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Uji Coba Monas Dijaga 4 Shift

Halal Kota, Warta Kota

Pemerintah Provinsi DKI akan uji coba penjagaan ketat di semua pintu Monumen Nasional (Monas) untuk memantapkan pedagang kaki lima (PKL) masuk wilayah seluas 80 hektar tersebut.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan, penjagaan ketat itu dilakukan sejak Sabtu (13/6) hingga Minggu (14/6). Unsur pengamanan berasal dari Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, petugas UPT Monas, aparat kepolisian hingga Garnisun.

"Kali ini, kami menggunakan istilah penjagaan bukan operasi atau razia besar-besaran, supaya Monas steril. Pengamanan itu untuk melakukan penjagaan Monas dari PKL, penyewa motor, atau penyewa apapun," kata Saefullah seperti dilansir *Kompas.com*, Minggu (14/6).

Penjagaan oleh Satpol PP dilakukan dengan sistem empat kali shift, yakni Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu



Jadi tiap shift ada 500 personel yang menjaga. Kalau cuma 200 personel mana kelihatan penjagaannya.

pagi, dan Minggu sore. Satu shift-nya ada 500 personel Satpol PP yang berjaga. Personel tersebar di semua pintu Monas dan di dalam kawasan Monas.

Selama ini, kata Saefullah, penjagaan Monas oleh Satpol PP tidak dilakukan dengan sistem shift. Namun, satu hari penuh sehingga banyak PKL yang lolos dari pengawasan Satpol PP.

"Di dunia manapun, jam kerja itu efektifnya 8 jam, jangan sampai 24 jam dan mereka akan hilang konsen-

trasi. Jadi tiap shift ada 500 personel yang menjaga. Kalau cuma 200 personel mana kelihatan penjagaannya," kata Saefullah.

Shift yang sama juga diberlakukan untuk unsur aparat pengamanan lainnya. Garnisun misalnya, DKI menempatkan 20 personel tiap shift-nya.

Saefullah mengatakan, penjagaan ketat ini untuk melakukan uji coba terhadap penjagaan Monas di hari selanjutnya. Rencananya, setelah penjagaan Monas selama dua hari ini dilakukan, DKI akan memperpanjang waktu penjagaan hingga jelang Ramadan.

"Nanti berbekal pengalaman satu minggu, akan kami lakukan evaluasi. Sebetulnya Monas ini bisa tertib atau enggak. Monas bisa tertib dengan berapa personel pengamanan, nanti bisa dievaluasi juga perlunya biaya tambahan untuk petugas pengamanan," kata Saefullah. (ang)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *15*

Bulan : *JUNI*

Tahun : *2015*

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,



PKL - Penertiban yang berkali-kali digelar aparat Satpol PP Jakarta Pusat, ternyata tidak membuat para pedagang kaki lima (PKL) kapok. Buktinya Jumat (12/6), puluhan PKL kembali memadati Jalan Jati Baru, Tanah Abang. (DIR)



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : *Senin* Tanggal : *15* Bulan : *JUNI* Tahun : *2015*

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Camat Kemayoran Bongkar PKL Liar

Jakarta, HanTer - Aparat Kecamatan Kemayoran akan membangun lokasi khusus kuliner bagi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di area Kemayoran. Keinginan melihat wilayahnya lebih tertata, lebih dahulu membongkar ratusan bangunan di sekitar Jalan Marto RW 09.

Camat Kemayoran, Herry Purnama menyatakan rencananya pembongkaran dilakukan Senin (15/6/2015). Nantinya PKL akan ditampung di sekitar Jalan Marto RW 09, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Sebelum dibangun tempat penampungan PKL, pihaknya akan lebih

dulu membongkar sekitar 300 bangunan yang berada di sekitar Jalan Marto RW 09.

Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya sudah memberikan tiga kali peringatan kepada ratusan kepala keluarga (KK).

"Surat peringatan terakhir pada hari Minggu lalu agar warga membongkar sendiri bangunannya," kata Herry, Minggu (14/6/2015).

Herry menambahkan, masalah ganti rugi sudah diselesaikan. Sedangkan pembangunan lokasi PKL akan dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK).

■ **Dadan**



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

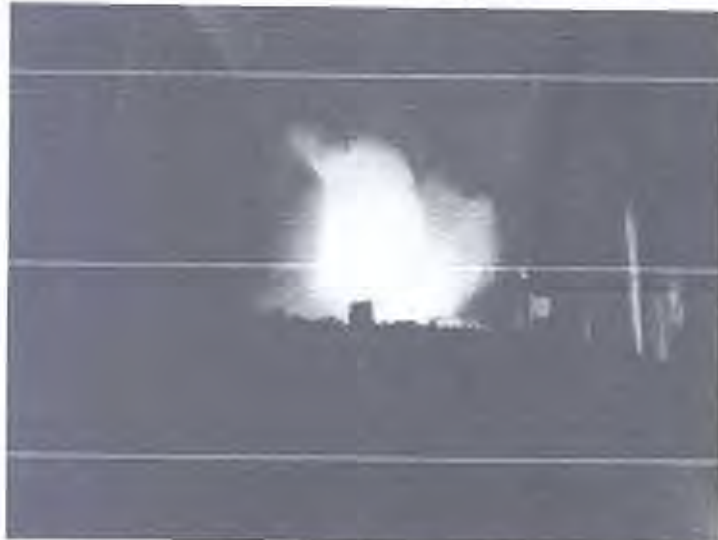
Hari : SENIN Tanggal : 15 Bulan : JUNI Tahun : 2015

MEDIA :	1. Indo Pos	7. Lampu Hijau	13. Republika	19. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	8. Media Indonesia	14. Suara Karya	20. Reaksi Nasional
	3. Kompas	9. NonStop	15. Sentana	21. Balak Pos
	4. Koran Sindo	10. Pos Kota News .com	16. Suara Pembaruan	22. Berita Jakarta.com
	5. Koran Tempo	11. Pelita	17. Sinar Harapan	
	6. Koran Jakarta	12. Rakyat Merdeka	18. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Korban Kebakaran Kwitang Mengungsi di Musala

reporter : Jhon Syah Putra Kaban | editor : Erikyani Maulana | Senin, 15 Juni 2015 21:59 WIB | dibaca 349 kali



(Foto : Jhon Syah Putra Kaban / Beritajakarta.com)

Korban kebakaran di Jl Kembang 7, RT 10/03, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen mengungsi di Musala Hayya Alasshola.

"Kita langsung siapkan bantuan makanan, selimut dan lainnya terlebih dahulu, mengingat itu sangat dibutuhkan saat ini "

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, usai kobaran api dikuasai

petugas, korban kebakaran langsung diungsikan ke musala terdekat. Korban kebakaran diberikan makan malam yang disediakan Sudin Sosial Jakarta Pusat.

"Kita langsung siapkan bantuan makanan, selimut dan lainnya terlebih dahulu, mengingat itu sangat dibutuhkan saat ini," ujarnya, Senin, (15/6) malam.

Mangara juga berjanji akan membantu warga untuk mengurus dokumen kependudukan yang terbakar.

"Prinsipnya semua akan dibantu, bagi warga silakan ajukan dokumen pergantian kepada sudin terkait," tandasnya.

Seperti diketahui, kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk Jl Kembang 7 RT 10/03, Senin (15/6) sore. Sebanyak 9 rumah yang dihuni 35 jiwa ludes terbakar.



GUNTINGAN BERITA

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

Hari : **Senin** Tanggal : **15** Bulan : **JUNI** Tahun : **2015**

MEDIA :	1. Indo Pos	6. Lampu Hijau	11. Rakyat Merdeka	16. Harian Terbit
	2. Jawa Pos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. Sinar Harapan
	3. Kompas	8. NonStop	13. Suara Karya	18.
	4. Koran Sindo	9. Pos Kota	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
2, 4, **6**, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

PKL Diundang Berkompetisi di Lenggang Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengundang para pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di lokasi yang dilarang untuk berkompetisi secara sehat di area Lenggang Jakarta.

Lenggang Jakarta merupakan pasar khusus PKL di kawasan Monas yang disediakan Pemprov DKI dalam menata keberadaan PKL.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menegaskan dalam waktu dekat tidak ada lagi PKL liar yang berdagang di sekitar Monas. Seluruh PKL diwajibkan bergabung ke area Lenggang Jakarta. "Jadi yang ingin berdagang, silakan berkompetisi di Lenggang Jakarta," kata Saefullah di Jakarta, Minggu (14/6).

Menurut Saefullah, persoalan PKL liar di Monas sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat kota madya. Namun,

Pemprov DKI akan tetap membantu pengamanan atau upaya sterilisasi PKL di kawasan Monas dengan menginstruksikan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Unit Pengelola Monas, serta dibantu aparat kepolisian setempat.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat pimpinan Pemprov DKI, diputuskan bahwa penjagaan kawasan Monas akan dilakukan Satpol PP dengan sistem jaga empat sif. Satu waktu terdiri atas 500 personel di semua pintu atau diperketat dengan penambahan 400 personel, dari sebelumnya yang hanya dijaga 100 personel.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk penjagaan Mo-

nas. Kukuh mengakui, selama ini petugas kerap kesulitan menghadapi PKL yang lebih galak dibanding petugas. Ia juga menegaskan, penjagaan ini tidak pandang bulu. Apabila ada PKL yang kedapatan menjajakan dagangan, akan dirazia.

"Tadi semua kami razia. Modusnya kan mereka kaya pengunjung. Namun, ketika kami buka bungkusannya, ternyata mereka bawa dagangan," tutur Kukuh saat dihubungi SH, Minggu (14/6).

Kukuh juga menerangkan, penertiban di Monas tidak hanya berlaku untuk PKL, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga akan terkena razia apabila terlibat di kawasan Monas. Ia juga menegaskan, adanya bocoran atau tidak, pihaknya akan tetap melakukan penjagaan di Monas.

(Nani Suberni)